



Hanya 90% KMS Terinventaris

Uji Publik akan Dilakukan 5-20 Mei 2014

YOGYA, TRIBUN - Uji publik Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk 2015 akan dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta pada awal Mei mendatang. Saat ini, Dinsosnakertrans masih berusaha untuk menyelesaikan proses inventarisasi data usulan penerima KMS 2015.

"Data dari kelurahan yang sudah terinventaris sekitar 90 persen, akhir april kemungkinan akan selesai. Karena petugas teknis yang mengurus hal tersebut hanya dua orang," kata Tri Maryatun, Kepala Bidang Bantuan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Kamis (24/4).

Meskipun inventarisasi data usulan penerima KMS belum selesai, namun Dinsosnakertrans sudah menyusun jadwal untuk melakukan uji publik. Direncanakan untuk uji publik di wilayah akan dilakukan 5-20 Mei 2014 mendatang.

Menurut Tri, pihaknya sudah mengajukan surat ke Sekretaris Daerah terkait dengan uji publik tersebut. Nantinya surat tersebut akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan uji publik pertama di wilayah.

"Sembari menunggu penyelesaian inventarisasi, kita sudah mengajukan surat ke Sekda untuk uji publik pertama. Kemungkinan akhir April kita akan mengundang lurah terkait dengan uji publik," kata Tri Maryatun.

Verifikasi Kelurahan
 Nantinya verifikasi akan dilakukan di Kelurahan dengan mengundang RT dan RW. Hasil dari verifikasi tersebut akan digunakan untuk membedakan kategori miskin dan menjadi dasar untuk uji publik kedua.

Pada 2014 ini, dari data yang dikeluarkan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta penerima KMS berjumlah 20.481 KK. Dari jumlah tersebut, kategori rentan miskin berjumlah 10.907 KK, kategori miskin berjumlah 9.365 KK dan kategori fakir miskin berjumlah 209 KK.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listiano menyebutkan penilaian yang dilakukan untuk menentukan penerima KMS harus benar-benar obyektif. Meninggkat masih banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan KMS justru tidak mendapatkan KMS.

"Jadi kecermatan Dinsos dalam penilaian di lapangan harus lebih teliti dan wajib melibatkan pengurus RT dan RW. Usulan RT dan RW harus benar-benar diprioritaskan, karena beliau-beliau yang mengetahui kenyataan di lapangan," kata Rifki. (dnh)

Tri Maryatun
 Kabid BPKS Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta

Tindak Lanjut

Negatif Amat Segera Untuk Ditanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005